

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indonesia merupakan negara dengan hubungan bilateral paling baik dengan Myanmar di kawasan ASEAN. Dalam merespon permasalahan yang terjadi di Myanmar, Indonesia juga menjadi satu-satunya negara yang melakukan *shuttle diplomacy* guna menyamakan pikiran serta pendapat negara anggota ASEAN agar dapat menghasilkan jalan keluar terhadap kekerasan yang terjadi di Myanmar. Pada 24 April 2021, ALM berhasil dilaksanakan di Jakarta dan menghasilkan lima poin konsensus yang bertujuan untuk menghentikan dan menekan junta militer untuk tidak menyakiti masyarakat sipil Myanmar. Keberhasilan Indonesia dalam mengajak negara anggota ASEAN untuk menghasilkan lima poin konsensus menjadikan Indonesia sebagai negara yang berperan dalam upaya penyelesaian permasalahan kudeta Myanmar tahun 2021.

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 bukanlah merupakan kudeta pertama bagi Myanmar, melainkan kudeta kedua. Sejak kudeta militer pertama terjadi kekuasaan di Myanmar disusuki oleh pemerintahan militer. Namun, hal tersebut tidak di terima oleh rakyat Myanmar seiring berjalannya waktu. Hal tersebut diakibatkan oleh kemunduran Myanmar yang semakin parah semenjak pemerintahan dikuasai oleh militer. Pada tahun 1988, dan 2007 terjadi pemberontakan yang dinamakan “Pemberontakan 8888”, dan “revolusi Saffron”. Pada saat gerakan tersebut, kondisi Myanmar bahkan lebih buruk daripada yang terjadi pada tahun 2021. Meskipun begitu, Hubungan bilateral antara Indonesia dan

Myanmar tetap berjalan dengan baik. Keduanya memiliki sejarah sebagai negara yang saling mendukung ketika awal kemerdekaan. Kedekatan keduanya sangat terlihat jelas ketika Indonesia merupakan satu satunya negara yang mendapatkan akses untuk melakukan kunjungan dan bantuan kemanusiaan pada saat awal permasalahan etnis Rohingnya terjadi yakni pada tahun 2012. Pada tahun 2017 Indonesia kembali menjadi satu-satunya negara yang bisa masuk dan melakukan dialog dengan Myanmar ketika Myanmar menutup diri dari dunia Internasional.

Pada saat kudeta militer Myanmar 2021 Indonesia menjadi negara pertama yang membahas upaya penyelesaian permasalahan dengan meminta menlu Indonesia dan menlu Malaysia mengajak ketua ASEAN dalam berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam upaya penyelesaian permasalahan ini Indonesia telah melakukan banyak kebijakan guna menunjang penyelesaian permasalahan yang terjadi. Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia, hasil dari penelitian ini penulis menemukan bahwa Indonesia dalam permasalahan ini memiliki posisi sebagai *regional protector*, dan *mediator-integrator*. Hal ini dilihat dari kebijakan Indonesia yang selalu menjadi inisiator dalam upaya penyelesaian kudeta militer Myanmar tahun 2021. Indonesia juga berhasil menyatukan perbedaan pendapat negara anggota ASEAN melalui *shuttle diplomacy*.

5.2 Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, penulis ingin memberikan saran pada penulis atau peneliti selanjutnya. Apabila penelitian akan dilakukan dengan tema yang sama penulis menyarankan untuk melakukan penelitian yang hasilnya dapat memberikan

masukan bagi pemerintah atau bahkan berisikan saran kebijakan bukan hanya bersifat deskriptif. Kemudian penulis ingin memberikan saran dan masukan pada pemerintah Indonesia untuk terus mendorong ASEAN agar terus mencari jalan keluar yang kongkret. Teurtama pada saat sekarang ASEAN telah berganti kepemimpinan, penulis harap Indonesia terus berusaha keras mempersuasi dan memberi penekanan layaknya pada pemerintahan ASEAN sebelumnya karena semakin kurang pemberitaan mengenai permasalahan ini, kita semakin kabur dalam menyadari setiap nyawa keluarga kita yang berjuang di Myanmar.

